

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapatkan berdasarkan hasil penelitian dan juga hasil pembahasan antara lain:

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan berhak untuk melakukan diskresi guna menyelamatkan Narapidana, sebagaimana berikut: Kepala Lembaga Pemasyarakatan mengintruksikan kepada seluruh petugas lembaga pemasyarakatan yang sedang melaksanakan piket untuk mengamankan lokasi Lembaga Pemasyarakatan dan Narapidana. Apabila saat terjadi gempa bumi memerlukan tenaga pengamanan yang banyak, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang menginstruksikan kepada seluruh petugas lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang untuk datang ke Lembaga Pemasyarakatan guna membantu pengamanan narapidana. Jika gempa bumi berskala besar, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang memberikan instruksi kepada komandan jaga untuk membuka seluruh pintu kamar Narapidana dan dikumpulkan ke lapangan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan menginstruksikan kepada petugas lembaga pemasyarakatan untuk melakukan penyisiran diseluruh lokasi Lembaga Pemasyarakatan untuk memastikan tidak ada Narapidana yang tertimpa runtuh bangunan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang menunjuk beberapa petugas untuk berjaga di Lembaga Pemasyarakatan hingga situasi darurat bencana selesai. Jika gempa bumi berpotensi tsunami maka Kepala

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang berkoordinasi dengan BPBD untuk mencari informasi berkaitan dengan potensi tsunami. Jika melalui hasil pantauan berkemungkinan terjadi tsunami Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang berkoordinasi dengan Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Kanwil Sumatera Barat untuk mengambil kebijakan evakuasi Narapidana. Proses evakuasi diarahkan menuju Gunung Padang dan apabila tidak memiliki cukup waktu untuk mencapai Gunung Padang maka evakuasi akan dialihkan ke *shelter* terdekat seperti bangunan tinggi di sepanjang jalur evakuasi, serta pemenuhan hak Narapidana di tempat evakuasi tetap dipenuhi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang, terutama untuk hak pokok seperti, makanan, obat-obatan dan informasi, dan Narapidana lansia yang memerlukan perawatan kesehatan khusus.

2. Kendala yang dihadapi oleh petugas lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kota Padang dalam menghadapi bencana gempa bumi antara lain: Informasi yang sulit dipastikan. Kesulitan komunikasi ketika terjadi bencana .
Minimnya Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang, *Overcrowded* Narapidana lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kota Padang. Stigma buruk dari masyarakat yang berbaur dengan Narapidana apabila Narapidana dibiarkan untuk menyelamatkan diri sendiri. Narapidana melarikan diri saat proses evakuasi. Dalam menghadapi kendala tersebut Lembaga Pemasyarakatan mengatasinya dengan cara: Berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai potensi kerawanan bencana susulan. Menggunakan alat komunikasi yang mudah digunakan saat bencana.

Menginstruksikan kepada seluruh petugas untuk membantu penyelamatan Narapidana. Melakukan tindakan preventif agar tidak terjadi tindak pidana. Pemberian edukasi kepada masyarakat bahwa Narapidana juga merupakan manusia yang hak nya harus dilindungi. Pengawasan yang ketat terhadap Narapidana pada proses evakuasi.

B. Saran

1. Sebaiknya Pemerintah segera menerbitkan peraturan mengenai tata cara penyelamatan, pengamanan, dan pemenuhan hak Narapidana ketika terjadi bencana, sehingga apabila terjadi bencana, petugas lembaga pemasyarakatan tidak kesulitan dalam mengamankan Narapidana.
2. Sebaiknya dilakukan penambahan jumlah petugas Lembaga Pemasyarakatan, karena mayoritas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas, penambahan jumlah petugas lembaga pemasyarakatan tersebut guna mengimbangi rasio perbandingan antara petugas lembaga pemasyarakatan dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.



